

Kebijakan, Implementasi dan Isu Strategis Pendidikan Bagi Individu Berkebutuhan Khusus

Aini Mahabbati

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

e-mail: aini@uny.ac.id

DOI: 10.14421/jpi.2014.31.31-46

Abstract

The special education is designed to provide educational services for individuals with special needs in order to achieve the appropriate potency and capacity. Implementation of special education starts from understanding the learners. Therefore, the identification and assessment of student learning needs must be from the first basic step, followed by adjustment of curriculum and learning. The nature of the curriculum is individual-contextual- and functional, with a range of education from early childhood until the age of transition to further education or future adult life. Special education strategic issues developed in a line of developments in the equal rights aof all people access education, and they moved from the segregatif paradigm to inclusive paradigm. The special education that is growing discourse is also influenced by social dynamics, economics, politics, culture, and religion.

Keywords: Education, Individuals with Special Needs

Abstrak

Pendidikan khusus dirancang untuk memberi layanan pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus agar dapat mencapai prestasi sesuai potensi dan kapasitasnya. Pelaksanaan pendidikan khusus dimulai dari memahami peserta didiknya. Oleh karena itu, identifikasi dan asesmen kebutuhan belajar siswa menjadi langkah awal yang mendasari, dilanjutkan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran. Sifat kurikulum adalah individual-kontekstual-fungsional, dengan rentang pendidikan dari usia dini sampai pada usia transisi menuju pendidikan selanjutnya atau kehidupan masa dewasa. Isu strategis pendidikan khusus berkembang searah

dengan perkembangan kesamaan hak semua orang dalam akses pendidikan, dan hal ini bergerak dari paradigma segregatif ke paradigma inklusif. Pendidikan khusus yang sedang berkembang juga dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama.

Kata Kunci: Pendidikan, Individu Berkebutuhan Khusus

Pendahuluan

Individu berkebutuhan khusus (*person with special needs*) merupakan sebutan bagi seseorang yang mengalami keadaan atau kapasitas diri yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Berbagai padanan kata dari istilah *special needs* (kebutuhan khusus) antara lain adalah *exceptional* (berbeda dari orang pada umumnya), *impairment* (rusak/cacat atau sakit, lebih pada makna medis), *handicap* (tidak bisa mengakses lingkungan), dan *disability* (tidak ada atau kurangnya fungsi).¹ Kategori kebutuhan khusus meliputi disabilitas intelektual dan perkembangan, disabilitas fisik, disabilitas sensoris (indera), hambatan/masalah perilaku, kesulitan belajar, serta cerdas dan bakat istimewa.²

Apabila dilihat dari sisi kebutuhan khususnya, orang dengan disabilitas intelektual dan perkembangan mengalami hambatan yang signifikan pada area mental (kemampuan berpikir dan *reasoning*), dan disebut retardasi mental. Disabilitas fisik mengalami hambatan pada area gerak dan mobilitas dikarenakan tidak lengkap atau tidak berfungsinya organ gerak. Disabilitas sensori meliputi hambatan pada penglihatan dan atau pendengaran yang disebabkan karena kondisi *impairment* pada organ indera. Hambatan dan masalah perilaku menjelaskan kondisi perilaku yang melanggar hak orang lain, kekerasan, dan tidak pantas dengan standar lingkungan.

¹ Blackhurst, A. E., & Berdine, W. H. Basic Concepts of Special Education. Dalam A. E. Blackhurst, & W. H. Berdine, *An Introduction to Special Education*, (Toronto: Litle, Brown, and Company, 1981), hlm. 7-48. Blackhurst & Berdine (1981) memberi penjelasan lebih lanjut, bahwa beberapa istilah tersebut bukan saja berkenaan dengan etimologi, namun lebih fungsional. Misalnya, seseorang dengan keadaan fisik yang tidak lengkap (polio pada kaki) tidak dapat disebut *handicap* apabila ia tidak bermasalah dalam mengakses layanan publik. Penggunaan beberapa istilah secara luas juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial terhadap orang dengan kebutuhan khusus. Misalnya, istilah *disability* lebih dipilih karena menunjukkan arti ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan karena kondisi *impairment*, dan tidak dihubungkan dengan ketidakberuntungan dalam akses kehidupan seperti yang tersirat pada istilah *handicap*. Lihat juga dalam Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pulen, P. C., *Exceptional Learners an Introduction to Special Educational 11th*. (Boston: Allyn & Bacon, 2009), hlm. 7. Demikian juga dengan pengaruh isu kemanusiaan. Penyebutan cacat sudah tidak lagi disarankan, dan mengganti dengan istilah kebutuhan khusus. Istilah disabilitas kemudian menjadi populer sejak Indonesia ikut meratifikasi UNCRPD (United Nations Convention on the Right of Person with Disabilities) pada tahun 2011

² Foreman, P. Setting and Scene: Teacher and Inclusion. dalam P. Foreman, *Inclusion in Action 2nd*, (Sydney: Thomson, 2008), hlm. 4-7

Kesulitan belajar merupakan istilah bagi masalah belajar pada area dasar (membaca, menulis, berhitung) yang bisa disebabkan karena hambatan intelektual, dan juga bisa karena adanya gangguan persepsi-spasial yang lebih disebabkan oleh disfungsi pada area otak tertentu (disebut kesulitan belajar spesifik). Cerdas dan bakat istimewa merupakan sebutan bagi kapasitas intelektual dan bakat yang melebihi tingkat usia seseorang sehingga perlu mendapat pendampingan khusus terkait masalah penyesuaian belajar, karakter emosi dan sosial, serta masalah penyerta lainnya.

Pada area pendidikan, keberadaan individu berkebutuhan khusus mengarah pada pembahasan mengenai bagaimana mereka tetap bisa mengakses pendidikan sebagaimana orang pada umumnya. Berdasarkan konsep pendidikan, pengertian individu berkebutuhan khusus adalah seseorang yang membutuhkan layanan pendidikan khusus dengan segala pendukungnya agar mereka tetap dapat mencapai kemampuan sesuai dengan potensinya.³ Area atau kategori kebutuhan khusus yang dialami seringkali tidak memungkinkan mereka untuk bisa mendapatkan proses dan hasil pendidikan yang optimal. Penyesuaian pendidikan dibutuhkan dikarena hambatan intelektual, sensori, fisik, komunikasi, dan atau perilaku yang dialami. Misalnya, seseorang dengan hambatan intelektual membutuhkan metode yang sederhana dan fungsional untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan area materi yang disesuaikan dengan kapasitas intelektual mereka. Contoh lain adalah seseorang dengan hambatan penglihatan berat membutuhkan huruf braille untuk pendukung aktivitas belajar. Hallahan dan Kauffman menyatakan bahwa layanan pendidikan bagi individu dengan kebutuhan khusus juga semestinya memperhatikan tingkat usia, faktor penyebab, tingkat keparahan, jenis kelamin, dampak pendidikan yang diberikan, dan dukungan lingkungan.⁴

Pendidikan untuk individu berkebutuhan khusus lebih dari sekedar pengaturan teknis layanan pendidikan saja, melainkan sebuah praktik yang lahir dari kesadaran gerakan hak asasi manusia sehingga isunya terus berkembang searah dengan kompleksitas dinamika kemanusiaan itu sendiri. Individu berkebutuhan khusus termasuk populasi minoritas yang rentan terhadap diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan. Pada dunia politik, isu ini seringkali dimanfaatkan untuk mengambil kebijakan keberpihakan atas hak penyandang disabilitas untuk meraih posisi politik. Pada isu ekonomi, mahalnya layanan publik yang aksesibel bagi mereka menjadi perhitungan ekonomis tersendiri, di samping telah maraknya lembaga persekolahan dan terapi yang ‘memanfaatkan’ keadaan mereka dengan

³ Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pulen, P. C., *Exceptional Learners an Introduction to Special Educational 11th*, (Boston: Allyn & Bacon, 2009), hlm. 8

⁴ Frida Mangunsong, *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Jilid Kesatu*, (Jakarta: LPSP3 UI, 2009), hlm. 3

perhitungan profit. Demikian juga dengan isu sosial budaya yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap mereka. Pada isu agama, secara paradigma keberadaan mereka menjadi instrumen pengasahan nilai-nilai agama. Semua hal tersebut sesuai dengan pernyataan Smith dan Kozleski bahwa pelaksanaan pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus penuh dengan inspirasi ide, strategi penerapan, bahkan advokasi pada tataran perumusan kebijakan dan implementasi lapangan.⁵ Unsur-unsur dari paradigma berpikir dan isu-isu berkembang tersebut secara langsung maupun tidak langsung menjadi penentu bagi kebijakan dan implementasi pendidikan khusus.

Konsep Dasar Pendidikan Khusus⁶

Individu berkebutuhan khusus berhak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dengan orang lain pada umumnya. Pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus sering disebut sebagai pendidikan khusus (*special education*), yakni disain pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari peserta didik berkebutuhan khusus yang meliputi materi khusus, tehnik mengajar, dan alat atau sarana pembelajaran.⁷ Selain itu, kekhasan pendidikan khusus juga tampak dari beberapa aspek yang termuat dari pengertiannya, yakni pendidikan sebagai proses belajar mengajar yang sadar dan sistematis; kebutuhan khusus sebagai keadaan peserta didik yang menjadi subjek pendidikan; layanan yang legal dan telah dipersiapkan; bersifat unik dan berbeda dari layanan pendidikan pada umumnya, konsistensi dan kedisiplinan sebagai penjamin keberhasilan, dan bertujuan untuk mencapai kemajuan akademik, personal, dan sosial bagi peserta didik.⁸

Dibanding dengan pendidikan umum, pendidikan khusus lebih kompleks dan mempertimbangkan banyak variabel. Penelitian Brownell, dkk. menemukan kompleksitas pendidikan khusus dibanding dengan pendidikan umum dari sisi kompetensi guru. Guru pada pendidikan umum disyaratkan mengetahui tujuan pendidikan secara jelas, mampu mengintegrasikan materi ajar dengan teori-teori pendidikan, dan memiliki pengalaman mengajar yang memadai.⁹ Syarat tersebut

⁵ Skiba, R. J., Simmons, A. B., Shana, R., Gibb, A. C., Rausch, M. K., Cuadrado, J., et al. (2008). Achieving Equity in Special Education: History, Status, and Current Challenges. *Council for Exceptional Children*, 74 (3), hlm. 264

⁶ Istilah pendidikan khusus (*special education*) dalam tulisan ini tidak menunjukkan pada pengertian sekolah khusus (*special school*) atau sekolah luar biasa, melainkan bermakna pada keseluruhan prinsip dan praktik pendidikan bagi individu dengan kebutuhan khusus.

⁷ Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pulen, P. C., *Exceptional Learners...*, hlm. 12

⁸ Farrell, M., *Foundations of Special Education: An Introduction*, (West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2009), hlm. 1-2

⁹ Brownell, M. T., Ross, D. D., Colon, E. P., & McCallum, C. L. (2005). Critical Feature of Special Education Teacher Preparation: A Comparison with General Teacher Education. *The Journal of Special Education*, 38 (4), hlm. 247

merupakan syarat minimal bagi guru pendidikan khusus. Pada pelaksanaan pembelajaran, guru pendidikan khusus harus lebih terampil dan detail dalam mengontrol kecepatan dan intensitas ritme mengajar, mengatur kerincian dan struktur bahan ajar, mengaplikasikan *reinforcement* (penguat) bagi siswa, memperkirakan rasio guru-siswa, mengadaptasi kurikulum, dan memonitor atau mengasesmen proses dan hasil pembelajaran siswa secara individual.¹⁰ Artinya, untuk dapat memberi layanan pendidikan khusus secara optimal, seorang guru seharusnya lebih dahulu memahami karakteristik perkembangan siswa pada umumnya, memahami konsep pendidikan dan prinsip pembelajaran umum sebelum memodifikasi pada situasi kebutuhan khusus siswa. Selain itu guru semestinya terampil menentukan keputusan dan melakukan improvisasi pada situasi tidak terduga yang menantang rancangan pembelajaran sebelumnya, dan yang lebih utama adalah memahami landasan filosofi dan moral akan pemerataan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua manusia.¹¹

Alur dan Dinamika Pendidikan Khusus

Pendidikan khusus mengharuskan penyesuaian dalam sistem kebijakan pendidikan dan rancangan implementasinya. Penyesuaian tersebut meliputi sistem rekrutmen peserta didik dan pendidik, area dan level materi, metode dan pendekatan belajar mengajar, media dan teknologi bantu yang digunakan, serta sistem evaluasi yang sesuai dengan karakteristik individual peserta didik berkebutuhan khusus. Secara lebih prosedural, pelaksanaan pendidikan khusus minimal meliputi tiga proses utama yang berurutan, yakni 1) identifikasi peserta didik dan asesmen kebutuhan belajar, 2) modifikasi kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar anak, serta 3) pemilihan pendekatan dan metode khusus dalam pembelajaran yang akomodatif terhadap kebutuhan khusus. Tiga alur utama tersebut dilaksanakan dengan pendekatan individual dan kolaboratif. Individual artinya, setiap proses dilaksanakan per-individu peserta didik, dengan memperhatikan perbedaan individu (*individual differences*) meskipun dengan tipe

¹⁰ Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pulen, P. C., *Exceptional Learners ...*, hlm. 13

¹¹ Kompleksnya pendidikan khusus salah satunya muncul dari variasi tipe kebutuhan khusus yang menyebabkan kesulitan untuk mengakses layanan publik termasuk pendidikan dengan cara yang sama dengan populasi homogen pada umumnya. Contohnya adalah, seseorang dengan hambatan penglihatan tentunya kesulitan dalam mengakses buku ajar yang ditulis dengan tulisan awas sehingga perlu tulisan braille dan media audio sebagai pendukung. Seseorang dengan hambatan pendengaran kesulitan untuk menangkap materi ajar yang disampaikan secara lisan oleh guru sehingga mereka perlu mendapat pendampingan bina wicara. Dan seseorang dengan hambatan perilaku rentan terhadap kegagalan pembelajaran karena masalah dalam atensi dan memiliki karakteristik perilaku menentang terhadap guru, sehingga guru perlu menerapkan teknik-teknik modifikasi perilaku secara intensif dalam pembelajaran. Hal lain yang menjadikan pendidikan khusus lebih kompleks adalah adanya diskriminasi terhadap kaum minoritas baik untuk alasan praktis-ekonomis dan isu dehumanisasi.

kebutuhan khusus yang sama. Kolaboratif artinya, setiap proses layanan tersebut dilaksanakan secara tim yang pada umumnya terdiri dari guru, kepala sekolah, tim ahli dari sekolah, ahli pendidikan khusus, ahli lain terkait kebutuhan khusus anak (dokter, psikolog, dan sebagainya), terapis, orangtua, dan masyarakat terkait.

Identifikasi sebagai prosedur atau proses awal dari pendidikan khusus merupakan upaya menemukan tipe kebutuhan khusus seseorang yang biasanya meliputi kegiatan menemukan masalah, *screening* (penjaringan), menentukan diagnosis tipe kebutuhan khususnya setelah terjaring sebagai individu dengan berkebutuhan khusus, dan mendalami dengan asesmen kebutuhan belajar secara individual.¹² Biasanya identifikasi dilakukan setelah ada kecurigaan kasus kebutuhan khusus yang dialami pada anak di usia dini atau usia sekolah awal. Adapun *screening* dilakukan pada seting komunal ketika menemukan kecurigaan akan kasus-kasus kebutuhan khusus pada suatu komunitas, misalnya perkampungan atau sekolah tertentu. Diagnosis dilakukan dengan tujuan untuk menentukan dan lebih menjelaskan tipe kebutuhan khusus yang dialami. Kemudian asesmen merupakan tindakan yang lebih komprehensif yang bertujuan mengungkap kekuatan dan kelemahan seseorang penyandang kebutuhan khusus secara lebih spesifik, level kemampuan pada beberapa area perkembangan, serta karakteristik dan kebutuhan belajar. Pada konteks pendidikan asesmen dilakukan secara berkala untuk mengukur kemajuan capaian pendidikan.

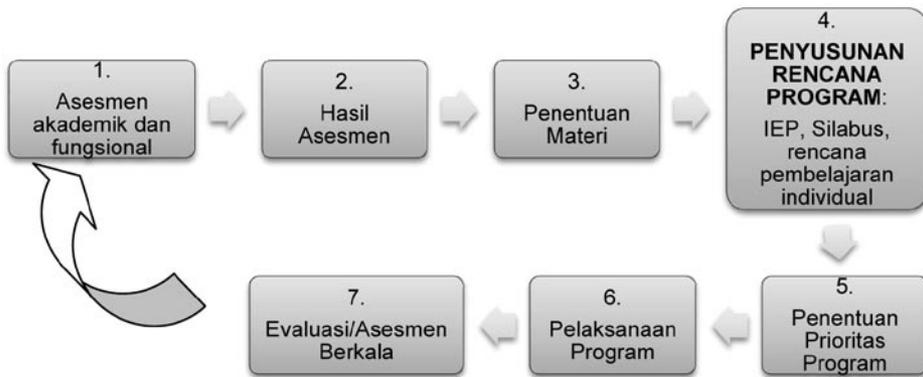
Identifikasi dan asesmen sebagai upaya untuk lebih mengenal karakteristik kebutuhan khusus individu kemudian ditindaklanjuti dengan modifikasi kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar. Modifikasi kurikulum ini meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan sistem evaluasi. Modifikasi kurikulum dimulai dari perumusan tujuan pengajaran yang memenuhi kebutuhan khusus anak, teramati aspek-aspeknya, dijabarkan dalam langkah operasional yang jelas, dan berdasarkan tujuan yang lebih luas.¹³

Kurikulum dalam pendidikan khusus diimplementasikan dengan prinsip pembelajaran individual atau disebut *Individual Educational Program* (IEP). IEP merupakan prinsip sekaligus aplikasi program pendidikan yang bersifat individual dan terdiferensiasi untuk siswa berkebutuhan khusus baik perencanaan, pelaksanaan, dan sistem evaluasinya. Isi IEP secara tertulis terdiri dari level kompetensi, tujuan jangka panjang, adaptasi kurikulum dan metode pembelajaran, layanan yang diberikan, rencana evaluasi, dan rencana layanan transisi (pendidikan lanjutan,

¹² Kershman, S. M. Early Childhood Education dalam A. E. Blackhurst, & W. H. Berdine, *An Introduction to Special Education*, (Toronto: Little, Brown and Company, 1981), hlm. 94-97

¹³ Frida Mangunsong, *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Jilid Kesatu*, (Jakarta: LPSP3 UI, 2009), hlm. 35

atau dari pendidikan ke dunia kerja) yang dibutuhkan¹⁴. Alur penyusunan IEP berangkat dari asesmen kebutuhan belajar, sebagaimana dalam bagan berikut ini.



Gambar 1. Bagan Alur Penyusunan Individual Educational Program¹⁵

Penekanan kurikulum pendidikan khusus meliputi dua wilayah utama, yakni akademik dan keterampilan fungsional untuk kehidupan sehari-hari. Penekanan tersebut berdasarkan kemampuan kognisi dari individu berkebutuhan khusus. Pada level pendidikan rendah (pendidikan usia dini sampai SD) penekanan kurikulum tetap pada wilayah keterampilan akademik. Namun, apabila kemampuan kognisi siswa tidak lagi bisa mencapai level akademik sesuai kurikulum standar maka kurikulum ditekankan pada akademik fungsional¹⁶ dan pada keterampilan fungsional keseharian yang meliputi keterampilan *activity daily living* (misalnya kemandirian pada aktivitas sehari-hari, pengaturan keuangan, kemandirian ekonomi, pengaturan waktu, dan sebagainya); keterampilan personal-sosial (tanggung jawab diri dan sosial, pengaturan perilaku); keterampilan komunikasi; dan keterampilan okupasi/vokasi.¹⁷ Pada siswa berkebutuhan khusus tanpa hambatan kognisi, kurikulum yang ditekankan sama dengan siswa pada umumnya, dengan berbagai penyesuaian cara pembelajaran.

Implikasi modifikasi kurikulum kemudian mengarah proses ketiga dari pendidikan khusus, yakni penyesuaian strategi dalam pembelajaran, pemilihan materi ajar, dan pemilihan teknik evaluasi yang sesuai dengan karakteristik dan

¹⁴ Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pulen, P. C., *Exceptional Learners ...*, hlm. 29

¹⁵ Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pulen, P. C., *Exceptional Learners ...*, 30

¹⁶ Akademik fungsional merupakan salah satu sifat modifikasi-adaptasi-akomodasi kurikulum terhadap kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Maksudnya adalah, pengajaran area akademik (misalnya membaca, menulis, berhitung) dikemas dengan materi yang dekat dengan kehidupan dan pengalaman nyata anak pada kehidupan sehari-hari sehingga akan berfungsi membantu mereka dalam keseharian. Misalnya, berhitung dengan digit ratusan dan ribuan memanfaatkan materi berbelanja dan mengecek struk harga.

¹⁷ Hardman, M. L., Drew, C. J., Egan, W. M., & Wolf, B., *Human Exceptionality, third edition*, (Toronto: Allyn and Bacon, 1990), hlm. 72-73

kapasitas siswa. Semua itu berdasarkan prinsip *instructional accomodations and adaptations*¹⁸ yang membantu siswa mencapai hasil maksimal sesuai potensinya tanpa menyulitkan mereka.

Proses dan area penekanan kurikulum dan pengajaran pada pendidikan khusus menunjukkan bahwa rentang pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus tidak hanya dilaksanakan pada usia akademik. Proses pendidikan khusus merentang mulai dari usia dini sampai pada usia transisi (peralihan usia sekolah ke usia dewasa). Pendidikan khusus pada usia dini diarahkan pada proses mengidentifikasi kecurigaan gangguan tumbuh-kembang pada anak serta stimulasi dini untuk mengoptimalkan tumbuh-kembang dan mencegah gangguan sekunder. Pada usia sekolah, pendidikan khusus diarahkan pada kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan khusus sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun pada usia transisi, program pendidikan khusus mempersiapkan kurikulum yang efektif bagi individu untuk memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat dan menjalani kehidupan dewasa yang mandiri, serta mempersiapkan sistem kerjasama yang melibatkan lembaga terkait untuk layanan pasca sekolah bagi individu berkebutuhan khusus.¹⁹

Isu Strategis: dari Segregatif ke Inklusif

Paradigma dan pendekatan pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus berubah dari waktu ke waktu. Dasar utama perubahan yang terjadi adalah kesadaran akan keberagaman (*diversity awareness*) dan pemenuhan hak-hak bagi setiap orang untuk mendapatkan pendidikan sesuai kompetensi dan kapasitas masing-masing. Bahkan, Johnsen & Skjorten menyatakan bahwa perubahan paradigma dan pendekatan yang lebih memberi kesempatan individu berkebutuhan khusus untuk belajar bukan hanya relevan untuk kepentingan mereka, namun juga bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk anak-anak lain dengan dan tanpa kebutuhan khusus, keluarga, guru-guru, kepala dan administrator sekolah, ahli-ahli yang terkait, serta masyarakat luas.²⁰ Paradigma dan pendekatan ini berjalan dari yang bersifat segregatif (terpisah) ke inklusif (menyatu).

¹⁸ Prinsip bantuan belajar ini dipilah pada tiga istilah, yakni modifikasi, akomodasi, dan adaptasi. Modifikasi merupakan perubahan pada proses pengajaran dan evaluasi atau asesmen yang memungkinkan siswa berkebutuhan khusus untuk melaksanakan dengan lebih mudah-sesuai kapasitasnya. Akomodasi merupakan istilah untuk perubahan pada cara menyampaikan pembelajaran, performa siswa yang diharapkan, dan metode asesmen kemajuan belajar dengan tanpa mengubah konten dan level kurikulum. Adaptasi merupakan perubahan isi dan level kurikulum, tujuan pembelajaran, dan metodenya. Lihat Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pulen, P. C., *Exceptional Learners ...*, hlm. 64

¹⁹ Blackhurst, A. E., & Berdine, W. H., *An Introduction to Special Education*. (Toronto: Litle, Brown, and Company, 1981), hlm. 56-78

²⁰ Frida Mangunsong, *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Jilid Kesatu*, (Jakarta: LPSP3 UI, 2009), hlm. 11

Pertama adalah isu normalisasi sebagai kunci utama munculnya pendidikan luar biasa, muncul pertama di negara Skandinavia dan menyebar ke Amerika Serikat pada tahun 1960 sampai 1970-an.²¹ Normalisasi sebenarnya adalah filosofi dengan pemikiran untuk menghilangkan hambatan bagi individu berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi pada kehidupan yang normal. Gerakan ini merupakan *counter* terhadap pemisahan atau pengucilan individu berkebutuhan khusus dari masyarakat. Implikasi pada dunia pendidikan adalah, siswa berkebutuhan khusus seharusnya diberi layanan pendidikan yang sebisa mungkin sama dengan siswa yang tidak berkebutuhan khusus. Isu normalisasi sendiri menjadi kekhawatiran tersendiri pada beberapa kelompok berkebutuhan khusus yang merasa cemas akan mampukah mereka berinteraksi dengan orang lain yang tidak mengalami hambatan. Kelompok optimis menyatakan bahwa kebutuhan khusus merupakan kondisi keberagaman yang menjadi fenomena biasa pada masyarakat yang menghargai perbedaan.²²

Isu kedua adalah deinstitutionalisasi yang dilatarbelakangi oleh fenomena mengenai penempatan individu berkebutuhan khusus-terutama yang mengalami hambatan mental, pada institusi-institusi yang jauh dari rumah. Oleh fenomena tersebut, gerakan deinstitutionalisasi terjadi pada tahun 1960-an sampai 1970-an berupa mengembalikan pendidikan dan tanggung jawab individu berkebutuhan khusus pada keluarganya. Gerakan ini percaya bahwa keluarga merupakan katalis terbaik bagi upaya integrasi individu dengan hambatan mental ini pada kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Namun demikian, penelitian pada era 1980 sampai 1999 menyatakan bahwa individu dengan hambatan mental dapat meningkatkan kemampuan adaptifnya dengan menempatkan mereka pada institusi yang bersifat *small community homes*. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa mereka sebaiknya dipersiapkan *quality of life* – nya sebelum dipindah dari institusi.²³

Berikutnya adalah *self determination* yang muncul atas latar belakang bahwa individu dengan atau tanpa berkebutuhan khusus tetap berhak untuk menentukan keputusan hidupnya, termasuk pendidikan dan tempat tinggal. Berdasarkan hal itu, *self determination* diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menentukan pilihannya, mengatur hidupnya, dan melindungi diri sendiri.²⁴ Semua bentuk layanan bagi individu harus berdasarkan pada keinginan, ketertarikan, kekuatan, dan kemampuan individu tersebut. Individu berkebutuhan khusus tetap berhak terhadap pilihan dirinya. Orangtua, para ahli, guru, dan administrator pendidikan hanya sebagai pendukung.²⁵

²¹ Frida Mangunsong, *Psikologi dan Pendidikan...*, hlm.12

²² Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pulen, P. C., *Exceptional Learners ...*, hlm. 47

²³ Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pulen, P. C., *Exceptional Learners...*, hlm. 49

²⁴ Hallahan, D.P., Kauffman, J.M.,& Pulen, P.C. *Exceptional Learners...*, hlm. 50

²⁵ Frida Mangunsong, *Psikologi dan Pendidikan...*, hlm. 13

Isu selanjutnya adalah inklusif penuh. Inklusif penuh dalam konteks pendidikan berarti penempatan siswa berkebutuhan khusus pada sekolah terdekat dengan rumah dan belajar dengan siswa lain tanpa kebutuhan khusus tanpa pemisahan kelas.²⁶ Inklusif penuh pada tataran teknis memberi tanggung jawab pada guru kelas untuk mampu memberi layanan pada siswa berkebutuhan khusus sama seperti siswa lainnya.²⁷ Paradigma pendidikan inklusif sebenarnya tidak hanya memperhatikan individu berkebutuhan khusus, melainkan pada seluruh perbedaan latar belakang pada peserta didik, seperti budaya, bahasa, agama, gender, dan keadaan ekonomi-sosial. Oleh karenanya, tataran teknis inklusif penuh tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa kesadaran akan keberagaman sebagai mental yang harus dimiliki oleh seluruh komponen yang berperan sebagai penentu kebijakan dan pelaksana pendidikan.

Isu strategis berkenaan dengan paradigma pendidikan khusus secara teknis terkait dengan model-model layanan pendidikan khusus yang juga merentang dari yang paling segregatif sampai yang paling inklusif. Meskipun, sekarang ini paradigma pendidikan inklusif berkembang pesat, namun beberapa praktik dari model layanan pendidikan khusus ini sampai saat ini masih dilaksanakan pada berbagai lembaga. Model layanan pendidikan khusus tersebut dijelaskan pada bagan di bawah ini.



Gambar 2. Model Layanan Pendidikan Khusus dari Segregasi ke Inklusif²⁸

²⁶ *Ibid.*, hlm.13

²⁷ Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pulen, P. C., *Exceptional Learners ...*, hlm. 53

²⁸ Hardman, M. L., Drew, C. J., Egan, W. M., & Wolf, B., *Human Exceptionality, third edition*, (Toronto: Allyn and Bacon, 1990), hlm. 45

Pertimbangan utama dari pemilihan model layanan pendidikan khusus adalah tingkat dan kondisi 'keparahan' kebutuhan khusus individu dan prinsip *Least Restrictive Environment* (LRE) dalam pemberian layanan pendidikan khusus. Tingkat dan kondisi kebutuhan khusus terkait dengan populasi kemunculan mereka. Semakin berat kondisi kebutuhan khusus tentu semakin sedikit populasinya. Adapun prinsip LRE menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk belajar di lingkungan yang tidak membatasi dan sesuai dengan kemampuan akademik, sosial, dan kebutuhan fisik mereka.²⁹ Piramida model layanan pendidikan khusus tersebut menggambarkan bahwa pendidikan yang paling integratif berada pada bagian piramida terluas yang menggambarkan lebih banyak populasi yang seharusnya bisa mengakses. Bagian puncak piramida merupakan model yang paling *restrictive* dan diharapkan diakses oleh sebagian kecil populasi yang memiliki tingkat kebutuhan khusus berat.

Meskipun model pendidikan inklusif penuh paling direkomendasikan berdasarkan pada prinsip LRE dan kesamaan hak, namun demikian masih ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penempatan siswa. Pertimbangan ketepatan model layanan pendidikan pada individu berkebutuhan khusus tergantung pada dua hal : 1) bagaimana karakteristik dan seberapa berbeda (seberapa berat kebutuhan khusus) siswa tersebut dari kebanyakan anak pada usia yang sama; dan 2) sumber daya apa yang dimiliki sekolah dan masyarakat.³⁰ Pertimbangan tersebut akan menghindari kesalahan penempatan atau terjebakny siswa dengan kebutuhan khusus belajar di sekolah dengan inklusif semu yang kurang siap secara filosofis maupun infrastruktur dalam menerima siswa berkebutuhan khusus namun memaksakan diri menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pendidikan Khusus dalam Paradigma Pendidikan Islam

Paradigma pendidikan Islam berisi nilai-nilai positif dalam ajaran agama Islam yang mengemas pendidikan yang konteks dengan sifat dasar kemanusiaan sebagai makhluk pribadi dan sosial. Pendidikan dan pemerolehan ilmu pengetahuan dalam Islam didasarkan pada peran penting pendidikan dalam mengembangkan sisi kemanusiaan dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.³¹ Bahkan, sejak masa lahirnya pada abad ke-7, Islam telah menempatkan pendidikan sebagai hal penting dan utama yang harus dijalani manusia, melalui firman pertama Tuhan yang memerintahkan untuk membaca. Membaca dalam firman pertama Tuhan tersebut bukan sekedar membaca huruf, namun membaca sebagai aktivitas mental tingkat

²⁹ *Ibid.*, hlm. 44

³⁰ Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pulen, P. C, *Exceptional Learners ...*, hlm. 13

³¹ Al-Lawati, F. A., & Hunsaker, S. L. (2007), Differentiation for the Gifted in American Islamic Schools, *Journal for the Education of the Gifted*, 30 (4), hlm. 502

tinggi yang membawa manusia untuk memiliki kesadaran literasi.³² Penekanan kesadaran literasi dan ilmu pengetahuan diberlakukan kepada seluruh umat dengan penegasan pada hadits Nabi bahwa setiap muslim laki-laki dan perempuan wajib menempuh pendidikan.

Apabila dikaitkan, paradigma pendidikan Islam dengan paradigma pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus memiliki benang merah yang kuat. Benang merah tersebut minimal menurut M.A. Fattah Santoso (2005) adalah, 1) pendidikan sebagai hak atau kewajiban bagi semua manusia; 2) kesamaan dalam memandang prinsip pendidikan untuk semua; 3) prinsip mendekatkan semua individu pada lingkungan seintegratif mungkin; 4) prinsip cara memandang kebutuhan khusus bukan dari sisi kelemahan internal, namun dari sisi bagaimana lingkungan eksternal dapat mengoptimalkan potensi positif.³³

Islam memandang pendidikan sebagai proses yang wajib ditempuh oleh semua manusia. Hal ini sesuai dengan tuntutan dalam Islam bahwa manusia merupakan pemimpin yang harus bertanggung jawab minimal pada dirinya sendiri. Menempuh pendidikan untuk mengasah potensi diri menjadi kewajiban dalam konteks posisi manusia sebagai pemimpin tersebut. Pendidikan khusus memposisikan pendidikan sebagai hak setiap manusia. Hak ini dipandang dari lingkup penentu kebijakan dan pemberi layanan yang harus menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan dasar manusia, sehingga pendidikan menjadi layanan yang wajib diberikan oleh pemberi layanan kepada pihak yang berhak menerima, termasuk individu berkebutuhan khusus.³⁴

Kesamaan lainnya adalah, konsep pendidikan untuk semua terdapat pada paradigma pendidikan Islam dan paradigma pendidikan khusus. Isu aksesibilitas pendidikan dalam Islam telah mulai berkembang sejak masa kerasulan. Firman Tuhan yang menegur Nabi karena mengabaikan Ummi Maktum penyandang hambatan penglihatan yang ingin belajar pada Nabi menjadi penegas bahwa aksesibilitas wajib diberikan oleh pemberi layanan pendidikan. Sekolah publik Islam pertama di Arabian Peninsula diselenggarakan di masjid Nabawi, dengan aturan pendidikan di lembaga tersebut berhak diakses oleh setiap orang di masyarakat, kaya atau miskin, bahkan budak sekalipun.³⁵

³² Mamah Siti Rohmah. Pendidikan Agama Islam dalam Setting Pendidikan Inklusif. *Tesis*. Tidak diterbitkan. (Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2010), hlm. 43

³³ Mamah Siti Rohmah. Pendidikan Agama Islam dalam..., hlm. 45

³⁴ *Ibid.*, hlm. 46

³⁵ Al-Lawati, F. A., & Hunsaker, S. L. (2007). Differentiation for the Gifted in American Islamic Schools. *Journal for the Education of the Gifted*, 30 (4), hlm. 503

Paradigma pendidikan untuk semua terkait dengan pelaksanaan pendidikan yang mengusahakan lingkungan seintegratif dan sedekat mungkin dengan situasi normal bagi semua peserta didik. Lembaga pendidikan merupakan pusat berkembangnya pengetahuan, mental, dan karakter dari manusia. Oleh karena itu, lembaga pendidikan bagi warga muslim bukan hanya menjadi tempat pengajaran ilmu pengetahuan dan keterampilan, namun sebagai lembaga penanam nilai positif sesuai ajaran agama.³⁶ Nilai penerimaan semua manusia dalam lingkungan senormal mungkin atau dalam pendidikan khusus disebut *Least Restrictive Environment* (LRE) bukan hanya bernilai teknis saja, melainkan memberi pembelajaran bagi seluruh komponen sekolah dan pendidikan bahwa pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, namun juga penerimaan akan perbedaan, dan upaya optimal untuk memberi yang terbaik.

Prinsip cara memandang kebutuhan khusus bukan dari sisi kelemahan internal, namun dari sisi optimalisasi potensi internal dan pendukung eksternal dapat ditemukan secara gamblang pada paradigma pendidikan Islam dan pada pendidikan khusus. Firman Tuhan yang menegur Nabi saat mengabaikan pembelajar yang mengalami hambatan penglihatan kemudian diikuti dengan penekanan bahwa kemauan belajar menjadi sisi positif yang harus difasilitasi, dan bukan memandang dari sudut keadaan buta sebagai kelemahan semata. Perumusan praktik-praktik pendidikan khusus juga melihat sisi positif atau potensi yang ada meskipun seseorang mengalami kebutuhan khusus. Sebaran kurikulum yang tidak kaku pada area akademik murni, namun akademik fungsional dan keterampilan fungsional menjadi penanda bahwa tujuan pendidikan tidak memaksakan manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan di luar batas kemampuannya. Berbagai penyesuaian pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran juga menunjukkan bahwa lingkungan eksternal peserta didik menjadi faktor pendukung utama bagi keberhasilan. Prinsip kolaborasi dengan melibatkan orangtua, seluruh tim di sekolah, ahli, dan masyarakat terkait dalam pendidikan khusus juga menandakan bahwa lingkungan eksternal anak juga perlu menjadi faktor utama yang dipertimbangkan dalam memberi layanan.

Simpulan

Isu pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus tidak bisa hanya dilihat dari implementasinya, melainkan dari paradigma berpikir. Terjebaknya pemikiran pendidikan khusus pada tataran pragmatis hanya akan membawa penyimpangan yang bisa muncul dari tataran kebijakan sampai pada tataran implementasi. Kasus yang dewasa ini banyak terjadi adalah, meskipun sejak tahun 2000-an pendidikan

³⁶ *Ibid.*, hlm. , 503

inklusif menjadi program yang disebarluaskan di Indonesia untuk searah dengan ikut sertanya kebijakan pendidikan Indonesia pada prinsip *education for all*, keluhan akan berbagai infrastruktur yang tidak siap pada pelaksanaan menjadi masalah tersendiri. Secara pragmatis, implementasi pendidikan khusus di Indonesia diupayakan untuk menjawab tantangan bagi kemudahan akses pendidikan bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penentu kebijakan bahkan telah memfasilitasi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari sisi pendanaan yang besar sampai pada penyediaan bantuan guru khusus dan alat belajar yang diperlukan, dan bahkan dengan pelatihan-pelatihan bagi guru dan pengelola secara berkala dan massif. Namun demikian, di luar masalah teknis-pragmatis tersebut, ternyata masih banyak anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah inklusif menjadi “kurang terdidik”, “keberadaannya seperti tidak ada”, “diabaikan dan ditolak dengan cara halus oleh guru dan orangtua siswa lain”, “mengalami diskriminasi”, dan ketidakberuntungan lainnya.

Praktik lain yang bisa dicermati dari sisi pertalian antara paradigma pendidikan Islam dan pendidikan khusus adalah beberapa implementasi pendidikan khusus pada setting pendidikan Islam. Al-Lawati & Hunsaker meneliti di beberapa sekolah dasar Islam di Amerika yang menerima anak cerdas (*gifted*). Penelitian bertujuan menemukan kesesuaian kurikulum yang diterapkan dan pembelajaran yang dilakukan guru dengan kebutuhan khusus siswa dan integrasi nilai-nilai Islam pada siswa *gifted*. Penelitian menemukan bahwa meskipun guru di sekolah-sekolah Islam menyatakan memiliki program dan metode khusus untuk siswa *gifted* seperti akselerasi, pengayaan, *worksheet*, dan tutor, namun guru kurang bisa menunjukkan perbedaan prosedur yang terstruktur untuk diimplementasikan pada siswa *gifted* dibanding dengan siswa biasa. Selain itu ditemukan bahwa guru-guru di sekolah tersebut tidak memiliki program khusus untuk siswa *gifted* pada muatan materi integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran.³⁷

Penelitian lain dilakukan oleh Arif & Gaad dengan tujuan untuk menganalisis pengembangan, sistem penyampaian, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan khusus di Uni Emirat Arab (UEA) yang budayanya relatif berafiliasi dengan ajaran Islam. Penelitian menemukan sistem pendidikan khusus di sana masih perlu dikembangkan. Guru mengajar berdasarkan pada buku teks reguler dan hanya melakukan modifikasi dengan menyederhanakan dan menghilangkan materi ajar yang dirasa sulit bagi siswa berkebutuhan khusus tanpa adanya asesmen kebutuhan khusus yang terstruktur. Pada penyampaian materi, guru ditemukan

³⁷ Al-Lawati, F. A., & Hunsaker, S. L. (2007). Differentiation for the Gifted in American Islamic Schools. *Journal for the Education of the Gifted*, 30 (4), hlm. 515-516. Al-Lawati & Hunsaker juga menambahkan bahwa temuan itu tidak sesuai dengan nilai dan paradigma Islam yang menyatakan bahwa kecerdasan seharusnya digunakan untuk lebih memahami agama. Pemahaman yang komprehensif pada ajaran agama akan meningkatkan tauhid dan kedekatan pada Sang Pencipta.

masih membutuhkan banyak pelatihan mengenai metode pembelajaran yang sesuai bagi siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa instrumen evaluasi pembelajaran masih perlu dimodifikasi untuk dapat memonitor dengan benar kemajuan belajar siswa berkebutuhan khusus. Penambahan sumber belajar untuk membantu kemudahan belajar siswa juga masih harus ditingkatkan.

³⁸

Gambaran praktik pendidikan inklusif di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan semua model pendidikan khusus, termasuk pendidikan inklusif harus diawali dari tataran perubahan paradigma atau sudut pandang yakni membari layanan pendidikan terbaik bagi seluruh individu tanpa membedakan dan memahami kondisi kebutuhan khusus sebagai salah bentuk dari keberagaman yang harus ditanggapi secara positif. Tanpa paradigma tersebut, disain pendidikan khusus sebaik apapun akan mengalami banyak hambatan praksis. Kasus sekolah Islam di Amerika yang menerima siswa *gifted* dan implementasi pendidikan khusus di UEA, menunjukkan bahwa paradigma pendidikan Islam yang membungkus budaya dan tata hidup pada kedua setting penelitian tersebut ternyata belum muncul dan terintegrasi ke dalam sistem dan belum menjadi spirit dalam praktik pendidikan khusus.

Paradigma positif mengenai hak asasi manusia akan pendidikan dan refleksi pada keberpihakan nilai agama dan budaya pada pendidikan khusus akan memperkuat kebijakan dan implementasi dari pendidikan khusus yang benar. Paradigma yang digabung dengan implementasi yang tersistem dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring akan menghasilkan layanan pendidikan khusus yang berhasil dalam model apapun, di tempat manapun, dan dalam berbagai situasi lingkungan dan budaya.

³⁸ Arif, M., & Gaad, E. (2008). Special needs education in the United Arab Emirates (UAE): a systems perspective. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 8 (2), hlm. 111

Rujukan

- F. A., Al-Lawati, & Hunsaker, S. L., Differentiation for the Gifted in American Islamic Schools, *Journal for the Education of the Gifted*, 30 (4), 2007.
- Arif, M., & Gaad, E, Special needs education in the United Arab Emirates (UAE): a systems perspective, *Journal of Research in Special Educational Needs*, 8 (2), 2008.
- A. E., Blackhurst, & Berdine, W. H, Basic Concepts of Special Education. Dalam A. E. Blackhurst, & W. H. Berdine, *An Introduction to Special Education*, Toronto: Litle, Brown, and Company, 1981.
- M. T., Brownell, Ross, D. D., Colon, E. P., & McCallum, C. L, Critical Feature of Special Education Teacher Preparation: A Comparison with General Teacher Education, *The Journal of Special Education*, 38 (4), 2005.
- M, Farrell, *Foundations of Special Education: An Introduction*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2009.
- P, Foreman, Setting and Scene: Teacher and Inclusion. Dalam P. Foreman, *Inclusion in Action 2nd* (hal. 2-36). Sydney: Thomson, 2008.
- Mangunsong, Frida, *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Jilid Kesatu*. Jakarta: LPSP3 UI, 2009.
- D. P., Hallahan, Kauffman, J. M., & Pulen, P. C, *Exceptional Learners an Introduction to Special Educational 11th*. Boston: Allyn & Bacon, 2009.
- M. L., Hardman, Drew, C. J., Egan, W. M., & Wolf, B, *Human Exceptionality, third edition*. Toronto: Allyn and Bacon, 1990.
- S. M., Kershman, Early Childhood Education, dalam A. E. Blackhurst, & W. H. Berdine, *An Introduction to Special Education* (hlm. 55-108). Toronto: Little, Brown and Company, 1981.
- Siti Rohmah, Mamah, *Pendidikan Agama Islam dalam Setting Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2010.
- R. J., Skiba, Simmons, A. B., Shana, R., Gibb, A. C., Rausch, M. K., Cuadrado, J., et al, Achieving Equity in Special Education: History, Status, and Current Challenges. *Council for Exceptional Children*, 74 (3), 2008.